

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM
MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PADA KANTOR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Oleh:
Muhammad Abadi Rakhman
NPM.17.12.0092

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2021**

ABSTRACT

Muhammad Abadi Rakhman. NPM. 17.12.0092. The Role of Head of Service in Implementing Orderly Administration at the Office of Cooperatives, Small Business and Trade in Tanah Laut Regency.

The background of this research was carried out, because the problem of the role of the Head of the Office in Implementing an Orderly Administration at the Office of the Cooperative, Small Business and Trade Office of Tanah Laut Regency, is still lacking.

The purpose of this research is to find out how the role of the Head of the Office in Implementing an Orderly Administration at the Office of Cooperatives, Small Business and Trade in Tanah Laut Regency.

The benefits of this research are expected to be useful for developing concepts and theories related to the influence of leadership on orderly financial administration at the Office of Cooperatives, Small Business and Trade, Tanah Laut Regency.

This research method uses descriptive-correlational research methods. This means that the researcher tries to describe and then tries to connect the relationship between the independent variable and the dependent variable.

The results of the study found evidence that the leadership role of the Head of the Office in carrying out administrative order, proved to be quite significant. This is supported by data analysis which shows that there are 62.96% of respondents who strongly agree that the leadership of the Head of the Office has shown concern for the welfare and needs of its employees; there were 66.67% of respondents who confirmed that the leadership of the Head of the Office had encouraged employees to excel in serving the community; 70.37% of respondents confirmed that the leadership of the Head of the Office had given full freedom to his subordinates to do their job professionally; there are 66.67% of respondents who confirmed that the leadership policies of the Head of the Office can maximize the effectiveness of employee performance; there are 77.78% of respondents who confirmed that the leadership policy of the Head of the Office as a leader has an effect on improving employee performance;

and there are 85.18% of respondents who confirmed that the leadership policy of the Head of Office that has been issued is proven to provide a harmonious relationship between superiors and subordinates and vice versa.

Keywords: Leadership, Orderly Administration

ABSTRAK

Muhammad Abadi Rakhman. NPM. 17.12.0092. Peranan Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.

Latar belakang penelitian ini dilakukan, karena masalah Peranan Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, dirasakan masih kurang.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.

Manfaat penelitian diharapkan berguna untuk mengembangkan konsep-konsep maupun teori yang berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan terhadap tertib administrasi keuangan pada kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-korelasional. Artinya peneliti berusaha menggambarkan dan kemudian mencoba menghubungkan adanya kaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian menemukan bukti bahwa peranan kepemimpinan Kepala Dinas dalam melaksanakan tertib administrasi, terbukti cukup signifikan. Hal ini ditunjang dari analisis data yang menunjukkan bahwa ada 62.96 % responden yang sangat setuju bahwa kepemimpinan Kepala Dinas sudah menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para pegawainya; ada 66.67 % responden yang membenarkan bahwa kepemimpinan Kepala Dinas sudah mendorong para pegawainya untuk berprestasi dalam melayani masyarakat; ada 70.37 % responden yang membenarkan bahwa kepemimpinan Kepala Dinas sudah memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk melakukan pekerjaannya secara profesional; ada 66.67 % responden yang membenarkan bahwa kebijakan kepemimpinan Kepala Dinas dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawainya secara maksimal; ada 77.78 % responden yang membenarkan bahwa kebijakan kepemimpinan Kepala Dinas sebagai pemimpin berpengaruh terhadap peningkatkn kinerja pegawainya; dan ada 85.18 % responden yang membenarkan bahwa kebijakan kepemimpinan Kepala Dinas yang sudah dikeluarkan terbukti memberikan hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan dan sebaliknya.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Tertib Administrasi

PENDAHULUAN

Kepemimpinan Kepala Dinas dengan hubungannya dimana seseorang yang berada diatas akan lebih mudah mempengaruhi orang lain (bawahannya) untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu kebijakan yang telah ditentukan. Cara pemimpin mempengaruhi bawahannya dapat bermacam-macam antara lain dengan memberikan motivasi, memberikan tanggung jawab, memberikan perintah, melimpahkan wewenang, mempercayakan bawahan,

memberikan penghargaan, memberikan kedudukan, memberikan tugas dan lain-lain. Dan kepemimpinan akan berjalan dengan efektif bilamana mampu memenuhi fungsinya. Maksud fungsi di sini adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh (Veitsal Rivai, 2004:53). Untuk itu setiap pemimpin harus mampu menganalisa situasi sosial kelompok atau organisasinya, yang dapat di manfaatkan dalam mewujudkan fungsi kepemimpinan dengan kerja sama dan bantuan orang-orang yang dipimpinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan organisasinya masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam bukan di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi kelompok atau organisasinya (Nawawi 2000:74). Pemimpin yang membuat keputusan dengan memberikan situasi kelompok atau organisasi akan dirasakan sebagai keputusan bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pula dalam melaksanakannya. Dengan demikian akan terbuka peluang bagi pemimpin untuk mewujudkan fungsi-fungsi kepemimpinan sejalan dengan situasi sosial yang dikembangkannya. Oleh karena itu fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. Suatu organisasi pada dasarnya adalah suatu bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih. Baik yang disebut orang ataupun kelompok, tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang telah ditentukan. Kepemimpinan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki karena kepemimpinan sebagai penggerak roda organisasi, yang dilakukan dengan meyakinkan bawahannya agar bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, kepemimpinan adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir, bertindak sedemikian rupa sehingga melalui fikiran yang positif, memberikan sumbangsih nyata dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan dan kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara melakukan sesuatu pekerjaan, salah satunya adalah dengan cara mendorong para pegawai agar dapat bekerja dengan efektif sehingga tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. Dengan demikian dibutuhkan kerja sama yang baik antar pemimpin dan para pegawainya, di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap para pegawainya yang malas dan berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberikan teguran dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini sebaiknya seorang pemimpin perlu menyelenggarakan daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pegawai sehingga tercatat semua hadiah dan hukuman yang telah di berikan kepada mereka. Untuk mencapai fungsi kepemimpinan yang telah digariskan oleh suatu organisasi, maka peran pimpinan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat menjalankan rencana strategis (Renstra) tersebut dengan baik dan benar, yaitu memberikan tertib administrasi yang benar dan akurat di Kabupaten Tanah Laut. Melihat latar belakang diatas kiranya penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam mengambil judul penelitian, yaitu : "Peranan Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Pada Kantor Koperasi. Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut".

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam mengadakan penelitian, penulis menjalankan beberapa prosedur untuk mendapatkan data-data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), bertujuan untuk memperoleh gambaran secara teoritis dengan jalan mempelajari buku-buku perpustakaan, keterangan-keterangan, bahan-bahan lainnya, yang ada hubungannya dengan objek penelitiannya. Pengetahuan yang diteliti diperoleh dari hasil penelitian ini akan dipergunakan sebagai bahan dasar analisa.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu peneliti terjun langsung kelapangan atau ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan bahan-bahan data berkenaan dengan objek penelitian.

Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan kemudian dibuat dalam suatu analisa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.

Pendekatan Penelitian

Mengingat objek analisisnya adalah manusia dengan perilaku yang akan dikembangkan maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat kualitatif yaitu strategi dan objek yang diteliti banyak menggunakan atau memanfaatkan informasi yang didapat dari responden, kemudian dikembangkan dan dikumpulkan guna dapat mendalami fenomena yang akan diteliti, sehingga nantinya dapat menggambarkan secara terperinci sesuai dengan sebenarnya, tanpa menggunakan kalkulasi baik matematik maupun statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah :

1. Interview, yaitu suatu metode pengumpulan data secara sistematis melalui wawancara langsung untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan informasi secara rinci yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.
3. Angket, yaitu sistem yang digunakan ditujukan pada pegawai Kantor Koperasi usaha kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Koperasi usaha kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, yang beralamat di jalan Datu Insad Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Penelitian dilakukan selama satu semester, tepatnya dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ; obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 55). Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota Kantor Koperasi usaha kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, yang berhasil ditemui kebetulan berjumlah sebanyak 32 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik atau separo yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005 : 56). Besaran sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah separo dari jumlah populasi, sudah dapat dikatakan mewakili responden yang ada, adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan “*stratified sampling*” yakni dengan mengelompokkan pegawai Kantor Koperasi usaha kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut kedalam kelompok masing-masing, yaitu sebagai berikut :

- Kepala Dinas 1 orang
- Sekretaris 1 orang

- Kepala Administrasi	1 orang
- Perwakilan pegawai Koperasi, UKM dan Perdagangan	13 orang
Jumlah	16 orang

Jadi keseluruhan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang.

Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan selanjutnya disesuaikan penyesuaian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan dan menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis dan terperinci, kemudian menelaahnya dengan berdasarkan pada teori, konsep ataupun logika yang relevan dengan objek penelitian, sehingga berdasarkan kesimpulan inilah nantinya akan diperoleh kesimpulan secara induktif. Analisis data dalam rangka memahami hasil data yang dikumpulkan, maka untuk menganalisis datanya digunakan analisis statistika sederhana yaitu menggunakan tabel frekuensi, dengan rumus:

$$\text{Rumus: } p = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan: p = persen, f = frekuensi, n = jumlah sampel

Kemudian dari analisis tersebut diatas, diinterpretasikan atau ditafsirkan sesuai dengan teori-teori yang dikuasai oleh peneliti.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kepemimpinan kepala Dinas koperasi dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan

Fungsi kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi dalam menggerakkan orang yang dipimpinnya menuju tercapainya tertib administrasi keuangan sebagai tujuan organisasi. Agar dapat menanamkan kepercayaan pada orang yang dipimpinnya dan menyadarkan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu dengan baik. Disamping itu, pemimpin harus memiliki pikiran, tenaga dan kepribadian yang dapat menimbulkan kegiatan dalam hubungan antar manusia, fungsi kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan para pegawainya untuk bekerja keras, memiliki semangat tinggi, dan memotivasi tinggi guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan adalah usaha untuk memandu, menuntun, membimbing, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, menjalin hubungan komunikasi yang baik dalam memberikan pengawasan yang efisien dan membawa para bawahannya kepada sasaran yang ingin di tuju sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah ditetapkan. (Kartini kartono, 2005:93). Selain itu, fungsi kepemimpinan adalah mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan. Dengan demikian inti kepemimpinan kepala koperasi bukan pertamata-tama terletak pada kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin dalam wadah organisasi. Setiap organisasi selalu dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya manusia dalam mencapai tujuannya. Interaksi atau hubungan antara berbagai sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai sasarannya secara efektif. Efektivitas kerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu secara benar dan sebagai kemampuan melakukan sesuatu tepat pada sasaran. Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas adalah memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan

menggunakan sumber-sumber terkait yang telah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Menurut Siagian (2000:56), efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak, sangat tergantung bila tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan dan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah kemampuan kerja bagi pegawai untuk dapat bekerja secara maksimal dengan membawa keuntungan bagi organisasi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, apabila kepemimpinan kepala koperasi mampu meningkatkan pengawasan tertib administrasi keuangan dengan efektivitas kerja para pegawainya maka, organisasi tersebut akan mendapatkan keuntungan terhadap pencapaian tujuan dengan waktu yang singkat dalam bekerja dan perolehan hasil kerja yang singkat. Apabila usaha-usaha positif tersebut untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai telah dilakukan, maka hal itu akan memberikan nilai tambah terhadap kepemimpinan camat itu sendiri. KUD adalah salah satu koperasi unit desa dibidang tambang batubara yang tugasnya menyelenggarakan pelaksanaan tugas Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan analisis diatas bagaimana hubungan fungsi kepemimpinan kepala koperasiterhadap efektivitas kinerja pegawai di kantor KUD tersebut, ditemukan beberapa informasi penting yang dapat dibahas dalam skripsi ini. Setelah diobservasi kemudian dilakukan penelitian pembahasan dengan membandingkan antara data yang didapat dilapangan dengan data impiris dari hasil angket yang disebarkan dilapangan untuk dianalisa secara kualitatif sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan maka data primer yang berhasil terkumpul dari responden dilapangan sebanyak 16 responden yang diharapkan dapat menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini. Analisa selanjutnya dari jawaban responden tersebut, ditabulasi dan kemudian dianalisis yang hasilnya dapat dijelaskan pada tabel dibawah nanti. Sekarang marilah kita lihat tanggapan resonden terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan perdagangan dalam mnelaksanakan tertib administrasi keuangan sebagai panduan kerja kepada para pegawai koperasi, serta menjadwalkannya

Tabel. 1

Kepemimpinan Kepala Dinas telah menjalankan tugasnya, yaitu memberikan pedoman penyusunan rencana dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data, dengan baik dan benar

Alternatif jawaban	F	Persentase
Sudah Menjalankan	12	75.00
Belum Menjalankan	3	18.75
Ragu-Ragu	1	6.25
Jumlah	16	100

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis diatas berarti lebih dari 50 % responden mengatakan, membenarkan dan mengetahui bahwa Kepemimpinan Kepala Dinas telah menjalankan tugasnya dalam memberikan pedoman penyusunan rencana dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, poengelolaan, analisa dan penyajian data dengan baik dan benar.

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa lebih dari 50 % responden mengatakan, membenarkan dan mengetahui bahwa Kepemimpinan Kepala Dinas dalam melaksanakan pedoman untuk menghimpun, menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kerja Koperasi, dengan baik dan benar.

Tabel. 4

Kepemimpinan Kepala Dinas telah menjalankan tugasnya menghimpun, menyiapkan bahan, menyusun rancangan rencana kegiatan anggaran sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, dengan baik dan benar

Alternatif jawaban	F	Persentase
Sudah Menjalankan	13	81.25
Belum Menjalankan	2	12.50
Ragu-Ragu	1	6.25
Jumlah	16	100

Sumber: Data Primer, 2020

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa lebih dari 50 % responden mengatakan, membenarkan dan mengetahui bahwa Kepemimpinan Kepala Dinas dalam menghimpun, menyiapkan bahan, menyusun rancangan rencana kegiatan anggaran sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, dengan baik dan benar.

Tabel. 5

Kepemimpinan Kepala Dinas telah menjalankan tugasnya, menyiapkan bahan rapat kerja koordinasi, dengan baik dan benar

Alternatif jawaban	F	Persentase
Sudah Menjalankan	13	81.25
Belum Menjalankan	1	6.25
Ragu-Ragu	2	12.50
Jumlah	16	100

Sumber: Data Primer, 2020

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa lebih dari 50 % responden mengatakan, membenarkan dan mengetahui bahwa Kepemimpinan Kepala Dinas dalam menjalankan, menyiapkan bahan rapat kerja koordinasi, dengan baik dan benar.

Tabel. 8

Kepemimpinan Kepala Dinas telah menjalankan tugasnya, melakukan pengelolaan pengawasan pembayaran gaji pegawai dan keperluan kantor, dengan baik dan benar

Alternatif jawaban	F	Persentase
Sudah Menjalankan	14	87.50
Belum Menjalankan	1	6.25
Ragu-Ragu	1	6.25
Jumlah	16	100

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa lebih dari 50 % responden mengatakan, membenarkan dan mengetahui bahwa Kepemimpinan Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor, dengan baik dan benar.

Tabel. 16

Kepemimpinan Kepala Dinas terhadap tugasnya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai bawahannya dalam memberikan tertib administrasi

Alternatif jawaban	F	Persentase
Sangat Berpengaruh	14	87.50
Tidak Berpengaruh	1	6.25
Ragu-ragu	1	6.25
Jumlah	16	100

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa lebih dari 50 % responden mengatakan, membenarkan dan mengetahui bahwa fungsi tugas Kepemimpinan Kepala Dinas terhadap tugasnya berpengaruh terhadap peningkatkan kinerja pegawai bawahannya dalam memberikan tertib administrasi.

2. Faktor Penghambat Fungsi Tugas Kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Keuangan

Hambatan-hambatan yang dihadapi fungsi tugas kepemimpinan kepala koperasi dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya Tumpang tindih pekerjaan. Tumpang tindih pekerjaan dikarenakan karena tidak adanya pembagian maupun perincian tugas yang jelas. Bahkan dapat pula terjadi tumpang tindih pekerjaan antara pimpinan dan bawahan, dimana untuk suatu aktivitas yang telah dilakukan oleh seorang pemimpin dilakukan juga oleh seorang bawahan. Sehingga terjadi kembaran pekerjaan yang mengakibatkan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda.
- b. Adanya Saling Lempar Tanggung Jawab. Setiap pimpinan yang akan melimpahkan wewenangnya kepada pegawai bawahannya harus mengetahui dengan jelas terlebih dahulu apa yang menjadi wewenang yang dimiliki pimpinan dalam organisasi tersebut. Sebab hanya dengan wewenangnya sendirilah yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Yang merupakan batas wewenang seorang pimpinan adalah bidang tugasnya. Kalau hal tersebut diatas diabaikan atau tidak diperhatikan akan timbul saling mengambil wewenang dari pejabat lain.
- c. Masih Kurangnya Koordinasi antara Pimpinan dan bawahan. Hambatan yang ketiga yang dihadapi kepemimpinan kepala koperasi adalah dalam mengkoordinir bawahannya, karena masih kurangnya volume pertemuan dalam forum resmi yang diadakan antara pimpinan dan bawahan, mengakibatkan sulitnya memberikan koordinasi kepada bawahannya. Ini berakibat kepada efektivitas pekerjaan yang akan dikerjakan dan dihasilkan.
- d. Masih kurangnya Komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan. Faktor ke empat yang menjadi penghambat fungsi tugas kepemimpinan kepala koperasi adalah kurang diterapkannya komunikasi dua arah, baik antara pimpinan dengan bawahan maupun sebaliknya antara bawahan dengan atasan, sehingga apabila ada permasalahan yang timbul, pasti memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikannya.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Kepemimpinan Kepala Koperasi Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Keuangan

- a. Mengatasi Tumpang Tindih Pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara terhadap beberapa pegawai selaku responden dapat diketahui bahwa terjadi adanya tumpang tindih pekerjaan antara pimpinan dan bawahan, dan ini dikarenakan masih minimnya pegawai yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- b. Mengatasi Saling Lempar Tanggung Jawab. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pejabat dan pegawai selaku responden di Kantor Dinas Koperasi dapat diketahui bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan wewenang, dimana yang dimaksud adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. pelimpahan sama dengan penyerahan. Jadi pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagai hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat ke pejabat ke pegawai yang ditunjuk. Jadi tegas bahwa pelimpahan wewenang itu bukan penyerahan hak dari pejabat ke pegawai yang lain.
- c. Mengatasi Koordinasi Antara Atasan dan bawahan di Kantor Dians Koperasi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepemimpinan Kepala Koperasi dengan

pegawai staf di bagian administrasi dan keuangan dapat diketahui bahwa koordinasi antara pihak atasan dan bawahan masih kurang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kurangnya koordinasi antara pimpinan dengan bawahan disebabkan masih kurangnya volume pertemuan. Dengan sedikitnya volume pertemuan itulah koordinasi terhambat pula. Sehingga untuk mengatasi permasalahan itu Kepemimpinan Kepala Koperasi akan menggalakkan rutinitas pertemuan antara sesama pegawai di bagian administrasi dan keuangan dan seluruh anggota koperasi di Kantor Dinas Koperasi, baik rutinitas pertemuan di tingkat formal (dilingkungan kerja) maupun rutinitas pertemuan di tingkat non formal (diluar jam kerja). Kemudian untuk meningkatkan koordinasi.

- d. Mengatasi Kurangnya Komunikasi Dua Arah antara Kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi dengan Bawahannya. Hemat penulis kendala yang keempat adalah masih kurangnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan, dalam hal ini Kepemimpinan Kepala Koperasi dengan bawahannya. Sehingga banyak pekerjaan yang mestinya mudah dikerjakan banyak tertunda, dikeranakan masih kurang pemahaman, baik diantara sesama pegawai, maupun antara atasan dan bawahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memperhatikan pembahasan pada masalah-masalah yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai **berikut**:

1. Bahwa fungsi tugas hubungan kepemimpinan kepala Dinas koperasi dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan, meliputi: ada 75.00 % responden yang membenarkan bahwa kepemimpinan kepala koperasi telah menjalankan fungsi tugasnya dalam memberikan pedoman penyusunan rencana dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan; ada 87.50 % responden yang membenarkan bahwa kepemimpinan kepala koperasi telah menjalankan fungsi tugasnya, melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan koperasi dengan adil; ada 87.50 % responden yang membenarkan bahwa kepemimpinan kepala koperasi yang telah dijalankan dapat memberikan pengaruh tertib administrasi keuangan; dan ada 62.50 % responden yang membenarkan bahwa fungsi tugas kepemimpinan kepala koperasi, sudah memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk melakukan pekerjaannya secara profesional.
2. Faktor penghambat fungsi tugas hubungan kepemimpinan kepala Dinas koperasi dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan adalah; banyaknya tumpang tindih pekerjaan; adanya saling lempar tanggung jawab antara pimpinan dan bawahan; masih kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan; dan masih kurangnya komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan.
3. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan fungsi tugas hubungan kepemimpinan kepala Dinas koperasi dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan adalah: harus mengatasi tumpang tindih pekerjaan dengan menambah jumlah pegawai, tapi diharapkan jangan sampai terjadinya asal angkat atau sebaliknya asal memberhentikan pegawai; harus mengatasi saling lempar tanggung jawab, dengan cara dalam pelimpahan wewenang, tanggung jawab dipikul bersama antara pejabat yang melimpahkan wewenang dan pegawai atau pejabat baru yang menerima wewenang; harus adanya koordinasi antara atasan dan bawahan, dengan koordinasi yang baik nantinya dapat dihindarkan perasaan lepas tanggung jawab antara satu sama lain; dan harus dapat mengintensifkan Komunikasi antara kepemimpinan kepala koperasi dengan bawahan dengan baik dan benar.

B. Saran-saran

Mencermati beberapa kesimpulan tersebut di atas, nampaknya yang perlu dicantumkan beberapa saran dalam skripsi ini, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Fungsi tugas kepemimpinan Dinas kepala koperasi dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan sudah berjalan dengan baik, dan kalau perlu ditingkatkan lagi, seperti dalam memberikan pedoman penyusunan rencana dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan; melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan koperasi; dan memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk melakukan pekerjaan secara profesional.
2. Adanya faktor penghambat fungsi tugas yang telah disebutkan tadi, sebaiknya kepemimpinan kepala Dinas koperasi dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan harus benar-benar memfokuskan atau memprioritaskan pekerjaan pada masalah tersebut dengan secepat-secepatnya, sehingga faktor penghambat tersebut tidak mengganggu aktivitas fungsi tugas kepemimpinan kepala Dinas koperasi dalam menjalankan tugasnya.
3. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan terhadap fungsi tugas kepemimpinan kepala dinas koperasi dalam menjalankan tertib administrasi adalah, mengatasi tumpang tindih pekerjaan yang ada di bagian perencanaan dan keuangan, menjalin koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan, dapat mengintensifkan Komunikasi di antara kepemimpinan kepala koperasi dengan bawahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen. 2004. *Organization and Leadership*. London: Unwin Ltd.
- Dimock dan Dimock, 1992. *Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Flippo. 1994. *Kepemimpinan dalam penelitian*. Jakarta: LP3ES.
- Hasibuan, Malayu H, (1997), *Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*, Jakarta, Aksara.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah Masalah Kenegaraan*, Terjemahan: Luchiana D. Lontoh, Jakarta, Rajawali.
- Ikun MS, (2002), *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kinerja Pegawai*
- Indra, Juli, (2000), *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Hotel Melia Purosani*.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, (1999), *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Kartono, Kartini, (1996), *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Rajawali.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Rajawali.
- Kootz, Harold, O' Donnel, Cyril dan Heinz, Wehrich, (1998), *Manajemen*, Singapura, Mc Grow Hill Book Company.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sevilla, Consuelo G., Ochave, Jesus A., Punsalan, Twila G., Regala, Bella P., dan Uriarte Gabriel G., 1984. *Pengantar Metode Penelitian*. Terjemahan oleh Alimuddin Tuwu. 1993. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Siagian, Sondang P. .1989. *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta, Bina Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 1996. *Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.
- Soekarno K. 1985. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta, Miswar
- Suganda, Dann. 1981. *Kepemimpinan di dalam Organisasi dan Manajemen*. Bandung. CV Sinar Baru.
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Terry, George R. 2000. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.